

Implementasi RESTful Principles pada Modul Pencegahan Kecurangan

Rama Padliwinata¹, Arfive Gandhi², Muhamad Johan Alibasa³

^{1,2,3}Fakultas Informatika, Universitas Telkom, Bandung

¹rpadiwinata@students.telkomuniversity.ac.id, ²arfivegandhi@telkomuniversity.ac.id,

³alibasa@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Fraud Deterrence Propeller (FDP) adalah solusi yang baik untuk mencegah terjadinya kecurangan pada sebuah entitas. Implementasinya yang berupa asesmen juga membuatnya mudah untuk dilakukan oleh entitas kecil sampai besar. Solusi yang baik tersebut masih bisa ditingkatkan dengan cara melakukan digitalisasi FDP. Salah satu cara digitalisasi FDP adalah dengan membuat Web Pencegahan Kecurangan yang mengimplementasikan FDP tersebut. Untuk membangun Web Pencegahan Kecurangan yang baik diperlukan kaidah implementasi yang tepat. Salah satu kaidah implementasi yang tepat adalah kaidah RESTful Principles. Berdasarkan evaluasi kecocokan antara NFR, implementasi, dan kaidah RESTful Principles, ditemukan bahwa RESTful Principles cocok untuk diimplementasikan ke dalam Web Pencegahan Kecurangan. Baik dari sisi NFR maupun dari sisi kaidah RESTful Principles semua terpenuhi dengan sesuai dari implementasi Web Pencegahan Kecurangan ini.

Kata kunci : FDP, RESTful Principles, kecurangan

Abstract

Fraud Deterrence Propeller (FDP) is a good solution to deter fraud in an entity. Its implementation in the form of assessments also makes it easy to be carried out by small to large entities. This good solution can still be improved by digitizing the FDP. One way to digitize the FDP is to create a Fraud Deterrence Web that implements the FDP. To build a good fraud deterrence web, the right implementation rules are needed. One of the right implementation rules is the RESTful Principles rule. Based on the evaluation of the compatibility between NFR, implementation, and RESTful Principles, it is found that RESTful Principles are suitable for implementation into the Fraud Deterrence Web. Both in terms of NFRs and in terms of RESTful Principles rules are all met accordingly from the implementation of this Fraud Prevention Web.

Keywords: FDP, RESTful Principles, fraud

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Fraud Deterrence Propeller (FDP) adalah kumpulan konsep pencegahan fraud yang meliputi enam konsep. Konsep-konsep tersebut di antaranya: *due diligent*, *enhancement*, *truthfulness and respect*, *efficacy of mind*, *reinforcement and communication*, dan *enforcement actions*. Masing-masing konsep memiliki indikatornya tersendiri untuk mengukur besar kemungkinan risiko terjadinya *fraud* [1].

FDP didesain untuk mengukur risiko terjadinya *fraud* pada sebuah entitas. Pada konteks ini, entitas bisa berupa perusahaan, organisasi, atau lembaga apapun yang memungkinkan untuk terjadi *fraud* di dalamnya. Implementasi FDP bisa dilakukan dengan melakukan asesmen berdasarkan enam konsep yang ada pada FDP. Setiap konsep memiliki kuesioner tersendiri sesuai dengan cakupan konsep tersebut. Sebagai contoh, salah satu pertanyaan dari kuesioner untuk konsep *due diligent* adalah "Apakah terdapat akuntan internal?". Pertanyaan tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah sebuah entitas memiliki akuntan internal. Jika sebuah entitas tidak memiliki akuntan internal, maka risiko terjadinya *fraud* pada entitas tersebut dianggap meningkat.

Sampai artikel ini dibuat, FDP baru bisa diimplementasikan dengan cara mengisi kuesioner secara konvensional baik menggunakan kertas, *microsoft excel*, maupun *google form*. Dengan pengisian kuesioner dengan cara tersebut, hasil kuesioner tidak bisa diperiksa secara langsung oleh *reviewer*. Selain kuesioner yang tidak bisa langsung diperiksa oleh *reviewer*, bukti dari masing-masing poin pada kuesioner perlu dikumpulkan juga pada tempat tersendiri supaya tidak hilang, tertukar, atau teracak. Setelah asesmen diperiksa dan diverifikasi oleh *reviewer*, hasil penilaian juga perlu dicatat untuk mengetahui potensi *fraud* secara berkala.

Solusi yang bisa diimplementasikan untuk mengatasi kekurangan tersebut adalah dengan mendigitalisasi FDP tersebut. Dengan digitalisasi FDP, maka kekurangan teknis seperti kerapian dokumen, kerapian pencatatan, keaslian data, kepastian data *real time*, bisa ditangani. Selain itu, informasi mengenai tanggal asesmen dan identitas asesor bisa tersimpan dengan rapi pada *database* sistem tersebut.

Salah satu cara untuk mengimplementasikan solusi tersebut adalah dengan membuat web yang bisa mengimplementasikan FDP tersebut beserta fitur penunjang lain seperti pengaturan hak akses dan pencatatan log aktivitas pengguna web tersebut. Jika cara tersebut diimplementasikan, maka asesmen FDP bisa dilakukan dengan